

RENCANA KERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG/KELURAHAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kelurahan TA 2025.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kelurahan 2025 disusun dengan memperhatikan perkembangan pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan terkini sebagai perencanaan selama lima tahun ke depan sektor pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/kelurahan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu masukan dari semua pihak untuk perbaikan sangat kami nantikan untuk meningkatkan rencana strategis sektor pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan Kabupaten Tulang Bawang di masa yang akan datang.

Menggala, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ARIANTO, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19791021 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang	22
3.2 Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, Rencana Kerja Provinsi, dan Rencana Kerja K/L serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang merupakan bagian utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang keduanya merupakan pelaksana dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan hasil pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kajian Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilaksanakan mulai dari tingkat kampung/kelurahan, kecamatan dan forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Tulang Bawang. Jadi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *botton up* dan *top down process*.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan Pemerintah serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2025;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2025;
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan serta menyesuaikan Rencana Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program & Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup .

BAB II.
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan selanjutnya dilakukan evaluasi–evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Program Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=7/6</i>	<i>9</i>	<i>10=5+7+9</i>	<i>11=10/4</i>
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	90%	91%	77%	95%	123%	89%	275%	306%
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Program Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK.Posyandu.,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Promosi TTG dari Tulang Bawang	90%	97%	90%	95%	106%	90%	282%	313%
		pengembangan program dan kerjasama pelatihan PKK	97%	97%	97%	99%	102%	97%	293%	302%
		jumlah dokumen laporan realisasi APBKAM dan laporan realisasi dana desa serta laporan hasil inventaris aset kampung	95%	99%	95%	100%	105%	95%	294%	309%
		persentase dokumen perencanaan berupa RPJMKAM, RKPKAM, APBKAM dan terbayarnya iuran bpjs kesehatan bagi aparatur desa	95%	100%	95%	100%	105%	95%	295%	311%
		Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat terfasilitasi	82%	92%	82%	87%	106%	82%	261%	318%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Program Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		meningkatkan dan melancarkan perekonomian masyarakat kampung kab. Tulang bawang	87%	97%	87%	90%	103%	87%	274%	315%
		persentase dokumen dan perjanjian kerjasama (PKS) antara pemerintahan kampung dan kejaksanaan	88%	95%	88%	90%	102%	88%	273%	310%
		pembangunan kampung berprestasi	92%	97%	92%	97%	105%	92%	286%	311%
		persentase Bumdes/Bumdesma yang mampu membuat laporan tahunan	88%	95%	88%	90%	102%	88%	273%	310%
		Tersedianya data IPKP sebagai bahan pengambilan kebijakan	87%	87%	87%	87%	100%	87%	261%	300%
		Data KPSPAM	85%	87%	85%	87%	102%	85%	259%	305%
		persentase laporan keuangan dan perencanaan umum kantor yang disediakan	88%	92%	88%	90%	102%	88%	270%	307%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Program Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		persentase dokumen perencanaan perangkat daerah	92%	92%	92%	95%	103%	92%	279%	303%
		persentase orang yang menerima gaji PHL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		persentase paket komponen instalasi listrik/penerangan peralatan dan perlengkapan kantor, ATK serta barang cetakan yang disediakan	90%	92%	90%	97%	108%	90%	279%	310%
		persentase laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	90%	92%	90%	95%	106%	90%	277%	308%
		persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	90%	92%	90%	92%	102%	90%	274%	305%
		persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	90%	90%	87%	90%	103%	87%	267%	297%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kinerja Pelayanan:

1. Adanya pelaksanaan perencanaan, penyediaan data informasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung/kelurahan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja;
2. Adanya peningkatan kinerja dan kemampuan kampung dalam penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan
3. Adanya motivasi kerja terhadap pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan kampung/kelurahan;
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam gotong royong menjaga kebersihan dan ketertiban kampung;
5. Adanya kampung yang berkualitas dan berswadaya;
6. Tersedianya Tehnologi Tepat Guna bagi masyarakat;
7. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kampung/kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan disampaikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Persentase Kampung Mandiri			3,31	3,97	4,64	5,30	2,72	3,67	4,64	5,30	
2	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat aktif			74,00	74,52	74,80	75,08	85,00	87,00	74,80	75,08	
3	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan			70,00	72,00	73,00	75,00			73,00	75,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan pada uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan yang dikelompokkan isu-isu strategi pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, dapat dikelompokkan menjadi beberapa isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

- a) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- b) Peningkatan kelembagaan kemasyarakatan di kampung dan kelurahan yang belum optimal;
- c) Pengentasan kemiskinan;
- d) Peningkatan Sarana dan prasarana kampung dan kelurahan yang belum memadai;
- e) Keterisoliran kampung;
- f) Penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- g) Pembinaan kualitas pokjanal posyandu;
- h) Peningkatan administrasi pemerintahan kampung/kelurahan yang belum maksimal;

Masalah yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang antara lain:

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya penyediaan data dan informasi bidang pemberdayaan;
- b) Keterbatasan sumber daya aparatur kampung dalam upaya menciptakan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan ;

- d) Kurangnya kreatifitas masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berrdasarkan Rencana Kerja RKPD tahun 2025 program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan pemerintah pusat terkait dengan percepatan pengetasan kemiskinan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel **2.4**.

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMK K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90%	3.289.522.897	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMK K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90%	3.289.522.897	
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMK K	1 Promosi TTG dari Tulang Bawang 2 pengembangan program dan kerjasama pelatihan PKK 3 jumlah dokumen laporan realisasi APBKAM dan laporan realisasi dana desa serta laporan hasil inventaris aset kampung 4 Jumlah dokumen perencanaan berupa RPJMKAM, RKPKAM, APBKAM dan terbayarnya iuran bpjs kesehatan bagi aparatur desa	90% 97% 95% 95%	4.728.571.212	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMK K	1 Promosi TTG dari Tulang Bawang 2 pengembangan program dan kerjasama pelatihan PKK 3 jumlah dokumen laporan realisasi APBKAM dan laporan realisasi dana desa serta laporan hasil inventaris aset kampung 4 Jumlah dokumen perencanaan berupa RPJMKAM, RKPKAM, APBKAM dan terbayarnya iuran bpjs kesehatan bagi aparatur desa	90% 97% 95% 95%	4.728.571.212	
			5 Kelompok Usaha Ekonomi	82%				5 Kelompok Usaha Ekonomi	82%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat terfasilitasi					Masyarakat terfasilitasi			
			6 meningkatkan dan melancarkan perekonomian masyarakat kampung kab. Tulang bawang	87%				6 meningkatkan dan melancarkan perekonomian masyarakat kampung kab. Tulang bawang	87%		
			7 jumlah dokumen dan perjanjian kerjasama (PKS) antara pemerintahan kampung dan kejaksanaan	88%				7 jumlah dokumen dan perjanjian kerjasama (PKS) antara pemerintahan kampung dan kejaksanaan	88%		
			8 pembangunan kampung berprestasi	92%				8 pembangunan kampung berprestasi	92%		
			9 Jumlah Bumdes/Bumd esma yang mampu membuat laporan tahunan	88%				9 Jumlah Bumdes/Bumd esma yang mampu membuat laporan tahunan	88%		
			10 Tersedianya data IPKP sebagai bahan pengambilan	87%				10 Tersedianya data IPKP sebagai bahan pengambilan	87%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kebijakan					kebijakan			
			11 Data KPSPAM	85%				11 Data KPSPAM	85%		
			12 Jumlah laporan keuangan dan perencanaan umum kantor yang disediakan	88%				12 Jumlah laporan keuangan dan perencanaan umum kantor yang disediakan	88%		
			13 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	92%				13 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	92%		
			14 Jumlah orang yang menerima gaji PHL	100%				14 Jumlah orang yang menerima gaji PHL	100%		
			15 Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan peralatan dan perlengkapan kantor, ATK serta barang cetakan yang disediakan	90%				15 Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan peralatan dan perlengkapan kantor, ATK serta barang cetakan yang disediakan	90%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			16 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	90%				16 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	90%		
			17 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	90%				17 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	90%		
			18 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	90%				18 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	90%		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, tema yang diangkat yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk itu kebijakan di tahun 2025 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan pengelolaan sampah;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menurunkan tingkat kemiskinan;
6. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
7. Meningkatkan rasio gini;
8. Menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah *“Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kampung/kelurahan”* dan *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan”*.

Sedangkan sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah *“Meningkatnya kampung berstatus mandiri”*, *“Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan kampung/ kelurahan”* dan *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan”* dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kampung/kelurahan		Persentase kampung mandiri	persen	4,64
		Meningkatnya kampung berstatus mandiri	Persentase kampung mandiri	persen	4,64
		Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan kampung/ kelurahan	Persentase kampung/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	74,80
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	67,46
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan	nilai	73,00

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 melaksanakan 2 Program, dan 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan dapat dilihat di tabel **3.3**

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1,	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Pencapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>							
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	3.289.522.897	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.436.520.957
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMKK						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2,	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Pemberdayaan Kampung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>		95%	4.678.571.212	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		95%	5.151.428.333
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	DPMKK dan Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
JUMLAH						7.968.094.109				8.587.949.290

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026. Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan tahun 2025 mencakup 2 Program , 2 Kegiatan terdiri dari 2 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- **Sub Kegiatan** : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- **Kegiatan** : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- **Sub Kegiatan** : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan yang memuat tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi

satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf/aparaturnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a). melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b). menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan/sukegiatan, indikator, dan target.
 - c). Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan secara triwulanan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 nantinya, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.